



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

BAPENDA KABUPATEN BREBES
JALAN VETERAN NO. 11 BREBES 52212 TELP. (0283) 671545

RENCANA KERJA
(R E N J A)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Veteran No. 11 Brebes 52212 Telp. 671545 Email: bapenda.brebeskab@gmail.com

BREBES, 30 JUNI 2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhaanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes (BAPENDA) Tahun 2023.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini, seluruh karyawan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab, disiplin kerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat waktu sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kemudian apabila isi dan materi Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, maka segala masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja yang akan datang sangat kami harapkan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BREBES


SUBANDI, SE, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19690711 199103 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	7
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	25
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
III.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Lalu	9
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	15
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	23
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	30

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD juga dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja BAPENDA) Kabupaten Brebes tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
- j. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi Acuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes selama tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BABI PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisi uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan atas temuan-temuan setelah proses tersebut disertai catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. **Program dan Kegiatan**, berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, pada tahun 2022 memuat 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan dengan total nilai Rp. 18.929.054.185,00. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan kegiatan, pagu yang terealisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 sejumlah 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total nilai Rp. 16.617.104.000.

Realisasi penyerapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2021 adalah sebesar Rp. 14.754.430.281,00 atau sebanyak 96,04% dari total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.362.601.988,00. Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 tersebut di atas, urutan 5 (lima) subkegiatan dari yang persentase penyerapannya paling rendah adalah sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran sebesar Rp. 147.360.000,00 terealisasi sebesar Rp. 110.877.730,00 (75,24%);

2. Subkegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dari anggaran sebesar Rp. 393.469.904,00 terealisasi sebesar Rp. 314.895.200,00 (80,03%);
3. Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dari anggaran sebesar Rp. 270.286.000,00 terealisasi sebesar Rp. 220.040.100,00 (81,41%);
4. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dari anggaran sebesar Rp. 38.222.680,00 terealisasi sebesar Rp. 31.959.500,00 (83,61%)
5. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari anggaran sebesar Rp. 35.490.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.925.000,00 (87,14%).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini:

TABEL T-C.29
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah / Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Milyard Rupiah)	107,23	108,61	102,12	124,43	121,84	Bapenda
		Target penerimaan pendapatan daerah (Milyard Rupiah)	432,83	392,54	412,22	518,51	125,78	Bapenda

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

SUBANDI, S.E, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 1969071 199103 1 010

Untuk tahun anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah mempunyai usulan anggaran sebesar Rp. 16.617.104.000,00 dijabarkan dalam 2 program, 8 kegiatan dan 24 subkegiatan. Diharapkan pada tahun 2022 keberhasilan kinerja dapat mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2017 - 2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes pada tahun 2022 adalah dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah yang terus menerus dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat. hal ini dapat ditempuh dengan kebijakan:

a. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan cara membangun Sistem Informasi Perpajakan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;
2. Penguatan kelembagaan dan aturan perpajakan dengan memperkuat Landasan Hukum Pajak Daerah;
3. Peningkatan Informasi kepada Publik tentang Pajak Daerah melalui kegiatan Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa.

b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Usaha yang dilakukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi:

1. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
2. Pengkajian potensi pajak daerah baru;

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pendapatan, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020, realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

No	Indikator	Kinerja									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Daerah (Milyard Rupiah)	356,09	346,91	373,89	379,08	392,59	392,54	412,22	518,51	432,83	-

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mempunyai pertumbuhan dengan kecenderungan (*trend*) yang meningkat/positif, sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terus mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah penghasil PAD, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, dan perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk pemungutan penerimaan retribusi daerah, diserahkan kepada SKPD pengelola retribusi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selaku koordinator pendapatan daerah berkewajiban membina dan memonitor perkembangan penerimaan retribusi daerah.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penghindaran pajak (*tax aversion*) oleh wajib pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perpajakan belum Memadai;
3. Sistem Informasi Manajemen Perpajakan yang belum Memadai;

4. Data tentang obyek pajak kurang akurat sebagai akibat dari masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subjek dan objek pajaknya;
5. Kurang intensifnya koordinasi dan evaluasi dengan pihak terkait seperti Kecamatan, Manpa, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dituntut untuk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya;
2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah terbatas pada pengelolaan Pajak Daerah saja.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPENDA;
3. Adanya kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan pendapatan daerah;
4. Adanya aplikasi perpajakan dan sistem pembayaran secara on line yang sudah dapat digunakan sampai ke tingkat desa-desa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

- 1 Trend Piutang Pajak Daerah yang selalu naik setiap tahun;
- 2 Volume objek pajak yang menjadi target dalam jumlah besar;
- 3 Nilai Jual Objek Pajak Tanah masih berada jauh di bawah nilai pasar;

- 4 Belum akuratnya data potensi pajak daerah atau adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali;

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Review terhadap rancangan awal rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana terlihat pada TABEL T-C.31 berikut ini:

TABEL T-C.31
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Brebes

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	82	13.062.738.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	82	12.271.693.940	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	88.948.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	39.170.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	88.948.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	39.170.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	10.252.975.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	10.410.186.270
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Brebes	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	10.252.975.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Brebes	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	10.410.186.270
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60	22.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Kabupaten Brebes	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60	22.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Kabupaten Brebes	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	0

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	777.893.000	6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis)	6	589.421.990
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Brebes	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.052.000	10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	9.400.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Brebes	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.668.000	20	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	41.434.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Brebes	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.327.000	20	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	29.219.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Brebes	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.016.000	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	82.950.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Brebes	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	36.766.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Brebes	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	42.560.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	515.064.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	383.858.990
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)	2	470.540.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)	2	18.301.680
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	173.055.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	297.485.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	18.301.680
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)	3	944.356.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)	3	806.934.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2000	12.474.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2000	14.685.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	150.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	66.360.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	781.792.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	725.889.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis)	3	566.026.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis)	3	407.680.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Brebes	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	220.396.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Brebes	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	208.570.000

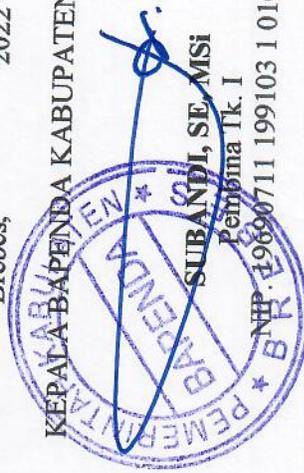
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	47.187.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	56.310.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	298.443.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Brebes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	142.800.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)	64.400	1.570.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)	64.400	1.872.035.000
			Peningkatan PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)	69.500	3.866.000.000				Peningkatan PBB dan BPHTB (Milyard Rupiah)	69.500	3.791.430.060
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)	7	1.570.000.000		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)	7	1.872.035.000
			Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)	2	3.866.000.000				Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)	2	3.791.430.060
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	50.000.000		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	49.966.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	200.000.000		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	550.000.000

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Laporan)	3	300.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	3	259.980.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	2.200.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	2	2.124.623.500
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Brebes	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1500	180.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Brebes	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1500	80.907.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1000	300.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1000	278.000.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	3	200.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	3	100.000.000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	60.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	60.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	2	1.421.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	2	1.420.899.560

	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	2	65.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	2	65.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	3	140.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	3	140.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Laporan)	4	220.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4	220.000.000
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	100.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Brebes	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	314.089.000
					18.498.738.000					17.935.159.000

Brebes, 2022

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BREBES



II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 tidak terdapat program/kegiatan yang merupakan usulan dari pemangku kepentingan, sebagaimana terlihat pada tabel T-C. 32 di bawah ini:

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Brebes

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada tingkat kementrian, lembaga yang selaras dengan pengelolaan keuangan daerah adalah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif.”

Sedangkan misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. **Mendorong peningkatan pendapatan daerah;**
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif. Adapun sasarannya yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan revisi UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi yang ditempuh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah terutama yang terkait dengan pendapatan daerah. Sasaran yang diadopsi untuk diimplementasikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang sesuai untuk dijadikan acuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yaitu meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah misi ketiga yaitu **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif** dan misi keempat yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal**.

Tujuan dari misi ketiga tersebut di atas adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif, di mana sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif yang dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator pencapaiannya.
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan optimalisasi aset secara efisien dan produktif serta mendorong tertib administrasi keuangan daerah, dengan indikator pencapaiannya Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD).

Adapun tujuan dari misi keempat tersebut di atas adalah terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal, di mana

sasaran yang dapat didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi dengan indikator pencapaiannya Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes melakukan penyesuaian tujuan dan sasarannya di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan **peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah** dengan meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah dapat dilihat atau diukur dari nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dari perangkat daerah tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau dalam mencapai indeks pengelolaan keuangan daerah, salah satu nya dapat ditempuh melalui **peningkatan kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap APBD**.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian daerah atau dalam rangka pencapaian Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP), upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah dengan **mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes** melalui pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam ketetapan pajak buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 s.d Rp. 100.000).

Dari uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa rumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1.	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
3	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah

III.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sejalan dengan Visi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu **“BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA”**, serta menyesuaikan dengan misi ketiga untuk **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif**, dan misi keempat untuk **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan**, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Brebes kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi dan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah.

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

TABEL T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Brebes**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktifitas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.2.	KEUANGAN								
5.2.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran BAPENDA		83 Nilai	12.271.693.940			84 Nilai	13.746.380.000
5.2.6.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	39.170.000			6 Laporan	97.842.000

5.2.6.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Brebes	6 Laporan	39.170.000			6 Laporan	97.842.000
5.2.6.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Brebes	60 Orang/bulan	10.410.186.270			60 Orang/bulan	11.278.273.000
5.2.6.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Kab. Brebes	60 Orang/bulan	10.410.186.270			60 Orang/bulan	11.278.273.000
5.2.6.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Brebes	-	-			60 paket	24.200.000
5.2.6.1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Brebes	-	-			60 paket	24.200.000
5.2.6.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Brebes	6 Jenis	589.421.990			6 Jenis	789.681.000

5.2.6.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Brebes	10 Paket	9.400.000			10 Paket	8.857.000
5.2.6.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Brebes	20 Paket	41.434.000			20 Paket	45.834.000
5.2.6.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Brebes	20 Paket	29.219.000			20 Paket	25.660.000
5.2.6.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Brebes	4 Paket	82.950.000			4 Paket	102.317.000
5.2.6.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Brebes	15 Paket	42.560.000			15 Paket	40.443.000
5.2.6.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Brebes	50 Laporan	383.858.990			50 Laporan	566.570.000
5.2.6.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Brebes	2 Jenis	18.301.680			2 Jenis	517.593.000
5.2.6.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Brebes	-	-			20 Unit	190.360.000
5.2.6.1.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Brebes	2 Unit	18.301.680			20 Unit	327.233.000

5.2.6.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Brebes	3 Jenis	806.934.000			3 Jenis	1.038.791.000
5.2.6.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Brebes	2000 Laporan	14.685.000			2000 Laporan	13.721.000
5.2.6.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Brebes	5 Laporan	66.360.000			5 Laporan	165.099.000
5.2.6.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Brebes	3 Laporan	725.889.000			3 Laporan	859.971.000
5.2.6.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Brebes	3 Jenis	407.680.000			3 Jenis	

5.2.6.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Brebes	15 Unit	208.570.000			15 Unit	242.435.000
5.2.6.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Brebes	25 Unit	56.310.000			25 Unit	51.906.000
5.2.6.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Brebes	2 Unit	142.800.000			2 Unit	328.287.000
5.2.6.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan PBB dan BPHTB	Kab. Brebes	69,50 Milyard Rupiah	5.663.465.060			73,50 Milyard Rupiah	6.535.000.000
		Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Kab. Brebes	64,40 Milyard Rupiah				66,03 Milyard Rupiah	
		Pemberian stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin	Kab. Brebes	3000 Orang				3000 Orang	
5.2.6.4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB	Kab. Brebes	2 Dokumen	5.663.465.060			73,50 Milyard Rupiah	6.535.000.000
		Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Kab. Brebes	7 Dokumen				66,03 Milyard Rupiah	
		Pemberian stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin	Kab. Brebes	3000 Orang				3000 Orang	
5.2.6.4.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Brebes	2 Dokumen	49.966.000			2 Dokumen	100.000.000

5.2.6.4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Brebes	1 Dokumen	550.000.000			1 Dokumen	200.000.000
5.2.6.4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Brebes	3 Laporan	259.980.000			3 Laporan	300.000.000
5.2.6.4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Brebes	2 Dokumen	2.124.623.500			2 Dokumen	2.350.000.000
5.2.6.4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Brebes	1500 Obyek Pajak	80.907.000			1500 Obyek Pajak	180.000.000
5.2.6.4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Brebes	1000 Dokumen	278.000.000			1000 Dokumen	300.000.000
5.2.6.4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Brebes	3 Pelayanan	100.000.000			3 Pelayanan	250.000.000
5.2.6.4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Brebes	12 Dokumen	60.000.000			12 Dokumen	60.000.000
15.2.6.4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Brebes	14 Dokumen	1.420.899.560			14 Dokumen	2.160.000.000

15.2.6.4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Brebes	2 Dokumen	65.000.000			2 Dokumen	175.000.000
15.2.6.4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Brebes	2 Dokumen	140.000.000			2 Dokumen	140.000.000
15.2.6.4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Brebes	4 Laporan	220.000.000			4 Laporan	220.000.000
15.2.6.4.1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Brebes	1 Laporan	314.089.000			1 Laporan	100.000.000

Brebes 2022
 KEPALA BAPENDA KABUPATEN BREBES


 SUBANDI SE, MSi
 NIP. 19690711 199103 1 010

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan tugas fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja, pencapaian Rencana strategis, serta visi dan misi Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes, dan setelah dilaksanakan Pemetaan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 terdapat 2 Program, 8 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, yaitu terdiri dari 1 program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, dan 1 program penunjang. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

PENUTUP

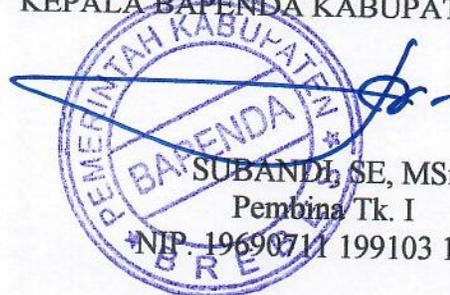
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja Bapenda) Kabupaten Brebes ini merupakan proses sistematis berkelanjutan yang disusun mengacu kepada Renstra. Di samping itu merupakan alat yang bermanfaat bagi manajemen dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas. Hal ini dapat terwujud apabila Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes masuk dalam Daftar Skala Prioritas Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPENDA. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPENDA Kabupaten Brebes.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Brebes, 2022

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BREBES


SUBANDI, SE, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19690711 199103 1 010